

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

PROFIL KOTA MALANG DAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG

3.1 Profil Kota Malang

Kota Malang adalah salah satu Kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota Malang berada disebelah selatan Kota Surabaya berjarak sekitar 92,5KM. Berdasarkan letak administratifnya Kota Malang berada bersebelahan dengan Kabupaten Malang dengan luas wilayah Kota Malang adalah 252,10 km² dan jumlah penduduk pada bulan april tahun 2016 sebanyak 887.443 jiwa (<http://suryamalang.tribunnews.com/>,2017).

1.2 Gambaran Umum Kota Malang

1.2.1 Sejarah Kota Malang

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

Perkembangan kota selalu diikuti oleh perkembangan pada sisi pemerintahan. Sejarah perkembangan pemerintahan Kota Malang digambarkan melalui beberapa tahapan (<http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/>,2017) :

1. Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya Gajayana.
2. Tahun 1767 Kompeni memasuki Kota

3. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas
4. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen
5. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota didirikan alun-alun di bangun.
6. 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja
7. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang
8. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia
9. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
10. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
11. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang

1.2.2 Geografis

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

1.2.3 Keadaan Geologi

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

1. Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri
2. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
3. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan

3.2.4 Demografi

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen =

105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT. Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2016 sebanyak 887.443 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan 3,8% per tahun.

3.2.5 Agama

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun2, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara (<http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/>,2017).

3.2.6 Pembagian Administrasi

Kota Malang terdiri atas 5 kecamatan dan terdiri dari 57 Kelurahan.

1. Kedungkandang
2. Sukun
3. Klojen
4. Blimbing
5. Lowokwaru

3.3 Lokasi

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terletak di Perkantoran Terpadu Gedung A lantai 3 Jl. Mayjen Sungkono Malang Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang.

3.3.1 Profil Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

3.3.2 Sejarah Lembaga

Tahun 2008

Penerimaan bantuan penguatan Media Center yang berbasis TIK/Internet dari Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika RI (sekarang Kemkominfo RI) kepada Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pariwisata, Informasi, dan Komunikasi (sejak Januari 2009 menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika) dari 75 Pemkab/Pemkot di Indonesia yang dinilai layak mendapatkan bantuan (<http://mediacenter.malangkota.go.id>, 2016).

Tahun 2009

Perubahan nama institusi dari Dinas Parinkom (Pariwisata, Informasi, dan Komunikasi) menjadi Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informatika) Kota Malang pada Bulan Januari 2009. Dengan instansi yang baru, Dinas Kominfo dengan alamat Jl. Majapahit yang sejak 1 April 2009 tepatnya pada HUT Kota Malang mengoperasikan media center dengan nama Kendedes. Usulan dari Walikota Malang, Drs. Peni Suparto, M.AP. Nama Kendedes berasal dari nama seorang istri Ken Arok pada Kerajaan Singosari dan merupakan ibu yang melahirkan raja-raja di tanah Jawa kemudian. MC Kendedes dapat dimanfaatkan

oleh masyarakat Kota Malang dan SKPD di lingkungan secretariat Pemerintah Kota Malang. Pada tanggal 14 Agustus 2009, Gedung Perkantoran Terpadu (Block Office) yang ada di wilayah Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang diresmikan oleh Wali Kota Malang Drs. Peni Suparto, M.AP. Maka sejak itulah Dinas Kominfo menempati Kantor Pelayanan Terpadu Jl. Mayjend Sungkono Gedung A Lt. IV termasuk media center juga ikut menempati tempat baru.

Gambar 1. Prasasti peresmian

Gedung Perkantoran Terpadu Pemkot Malang



Sumber : (<http://mediacenter.malangkota.go.id>, 2016).

Tahun 2010

Pada awalnya Media Center Kendedes yang letaknya di Lantai IV Kantor terpadu. Pengunjung masih kesulitan dan belum mengenal adanya media center, namun setelah itu banyak pengunjung yang memanfaatkan media Center kendedes. Untuk kedepannya sesuai saran Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, Media Center direncanakan bertempat di lokasi baru yang lebih strategis dan mudah dijangkau masyarakat.

Gambar 2. Gedung Perkantoran Terpadu

(Gedung A tampak dari belakang)



Sumber : (<http://mediacenter.malangkota.go.id>, 2016).

Tahun 2011

Media Center Kendedes yang saat itu sudah memiliki sejumlah fasilitas komputer menerima bantuan peningkatan kapasitas Media Center berupa perangkat keras yang terdiri dari tambahan PC Desktop dan beberapa perlengkapan lainnya. Ruangan yang saat itu hanya menampung empat unit PC desktop akhirnya dipindahkan ke ruangan media center yang lebih besar.

Ruangan tersebut, selain digunakan untuk layanan gratis internet, cukup luas untuk tempat forum diskusi dan mengadakan pertemuan maupun pelatihan. Sebagai ruangan serbaguna, beberapa kali ruang media center digunakan untuk bimbingan teknis dan pelatihan tenaga pengelola website kelurahan di Kota Malang. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan website kelurahan yang dibangun secara bertahap, dapat dikelola dengan baik oleh tenaga operator yang ada di tiap-tiap kelurahan.

Tahun 2012

Menindaklanjuti UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Wali Kota Malang telah menetapkan Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Informasi Publik. Salah satu amanat yang termaktub dalam perwal tersebut adalah penyediaan desk pelayanan informasi publik. Mengingat bahwa ruang media center masih cukup luas, maka sebagian ruang Media Center Kendedes digunakan sebagai desk pelayanan informasi publik.

Setiap masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik dapat langsung datang ke tempat tersebut untuk mengisi formulir permohonan informasi publik. Meskipun sumber daya manusia yang ada cukup terbatas, namun Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui desk pelayanan informasi publik yang juga bertempat di ruang Media Center Kendedes Kota Malang.

Tahun 2013

Ruang Media Center Kendedes sempat digunakan oleh tim verifikasi informasi untuk pengujian informasi publik bagi masyarakat. Memang, sampai dengan akhir 2013. Frekuensi pemanfaatan ruang media center oleh masyarakat luas masih belum memenuhi target, karena lokasi yang terletak di lantai tertinggi gedung A. Selain itu, Kendala perawatan (maintenance) hardware dan koneksi internet yang tersedia belum memadai, sehingga tidak semua fasilitas yang ada dapat digunakan dengan baik. Namun di tengah kendala tersebut, Dinas Kominfo Kota Malang berupaya agar perawatan fasilitas dan kualitas pelayanan publik

tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu direncanakan pada tahun berikutnya, dialokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan media center ini.

3.3.3 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)

1. Terwujudnya industri dan perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi, mendorong tumbuh suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan sebagai pencipta kemakmuran rakyat yang berkeadilan.
2. Terwujudnya industri dan perdagangan sebagai sektor penggerak ekonomi kerakyatan dan tumbuhnya daya saing ekonomi yang berkeadilan.

Melalui visi tersebut diharapkan terwujudnya industri yang tangguh dan berdaya saing terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas, sehingga produk industri lokal maupun pelaku usaha dagang Kota Malang mampu bertahan bahkan bersaing dengan derasnya arus produk impor baik dari luar daerah maupun luar negeri. Selanjutnya menjadikan sektor industri dan perdagangan sebagai penggerak ekonomi utama di Kota Malang dengan tetap memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi Industri dan Pedagang Kecil Menengah. Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG), untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan perindustrian dan perdagangan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, maka Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2013 - 2018 adalah :

1. Menyediakan perangkat regulasi di Bidang Industri dan Perdagangan dalam rangka melindungi usaha lokal serta pembinaan dan pemberdayaan sektor industri dan perdagangan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang industri dan perdagangan melalui penetapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan.

3.3.4 Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Pengertian tujuan menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Tujuan dimaksud ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dalam rangka merealisasikan misi, maka tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

MISI I : Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Pembuatan Regulasi dalam Rangka Perlindungan, Pembinaan dan Pemberdayaan Dunia Usaha.

Tujuan :

1. Menyediakan perangkat regulasi di Bidang Industri dan Perdagangan dalam rangka melindungi usaha lokal serta pembinaan dan pemberdayaan sektor industri dan perdagangan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang industri dan perdagangan melalui penetapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan.

MISI II : Mendorong Peningkatan Nilai Tambah Industri dengan Fasilitasi Penguasaan Teknologi Industri dalam Rangka Meningkatkan Peran dan Kontribusi IKM terhadap PDRB

Tujuan :

1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri melalui perbaikan rantai nilai produksi IKM.
2. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri untuk menumbuhkan industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan Meningkatkan peran dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB melalui penguatan struktur industri dan penataan kawasan industri yang ramah lingkungan.

MISI III : Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan dan Ekonomi Kreatif melalui Fasilitasi Promosi dan Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan.

Tujuan :

1. Meningkatkan daya saing produk lokal melalui peningkatan kualitas dan citra produk ekspor Kota Malang.
2. Meningkatkan akses pasar dalam negeri dan pasar ekspor melalui fasilitasi promosi yang efektif Mendorong dan memfasilitasi aspek legalitas pelaku usaha.

MISI IV: Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok dan Penguatan Jaringan Distribusi.

Tujuan :

1. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi dengan menjalin komunikasi yang efektif dengan para pelaku usaha.

MISI V: Meningkatkan Perlindungan Konsumen.

Tujuan :

1. Menghindarkan masyarakat dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta melindungi produsen lokal terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat.
2. Menjadikan konsumen sebagai ”konsumen cerdas”.

MISI VI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pengembangan Tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Tujuan :

1. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang ditopang oleh efisiensi struktur organisasi, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan kompeten, sarana/prasarana yang mencukupi dan data-data yang menunjang.
2. Memperbaiki iklim usaha melalui reformasi birokrasi.

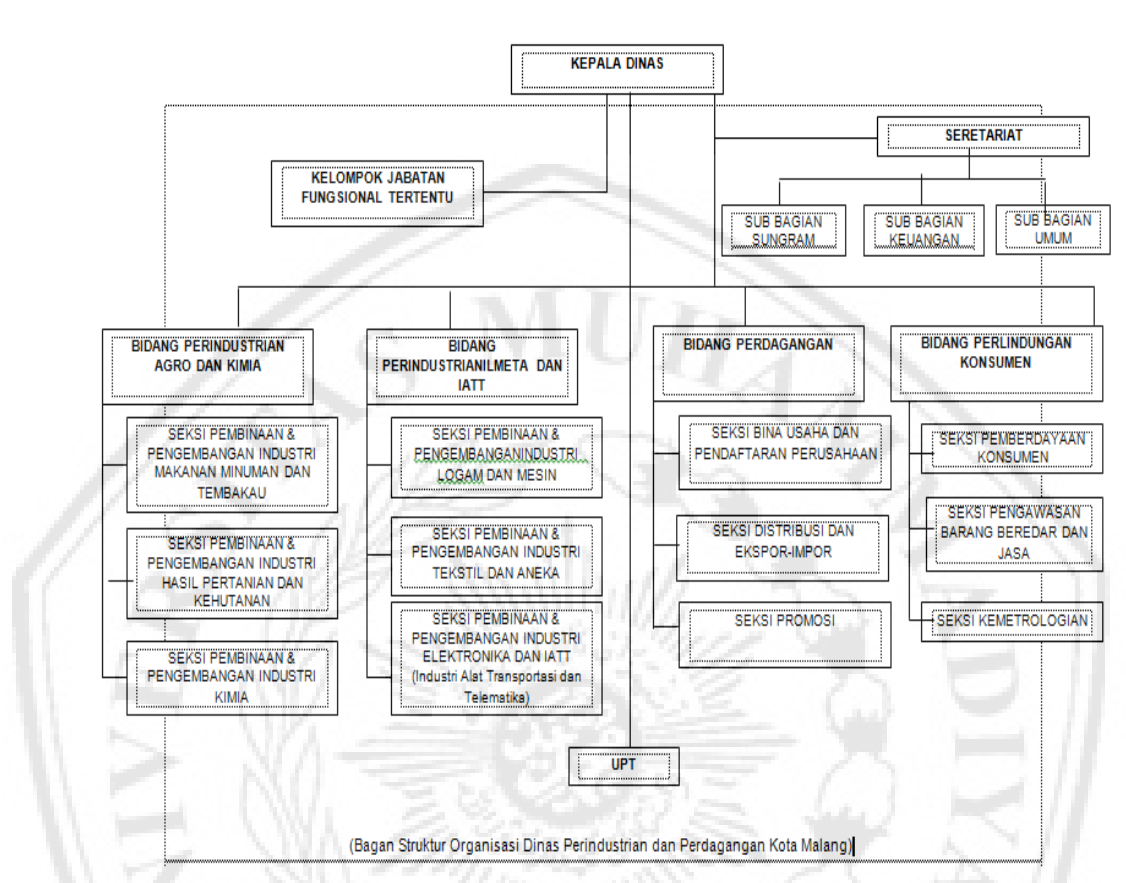
**Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas
Perindustrian dan Perdagangan**

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN
TUJUAN 1	1. Meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi dan standarisasi industri	PDRB Sektor industri	PDRB industri non migas atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan
SASARAN	1.1 Meningkatnya penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri	1. Persentase Peningkatan produk industri yang berstandarisasi	Jumlah industri yang memiliki produk terstandarisasi/jumlah total industri x 100% Penjelasan : Yang dimaksud dengan industri yang memiliki produk terstandarisasi adalah industri yang sudah memiliki SOP teknis

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN
		2. Persentase peningkatan industri yang menguasai teknologi	Jumlah industri yang menggunakan teknologi dalam proses produksi /jumlah total industri x 100% Penjelasan : Industri yang menggunakan teknologi dalam proses produksi adalah industri yang $\geq 50\%$ proses produksi dilakukan secara mekanisasi
	2.1 Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri	1. Jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi tahun berjalan
	3.1 Meningkatnya inovasi industri	1. Persentase jumlah IKM yang melakukan inovasi produk	Jumlah industri yang melakukan inovasi produk/jumlah total industri x 100% Penjelasan : Yang dimaksud inovasi adalah pengembangan produk
TUJUAN 2	2. Meningkatkan kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan terhadap konsumen	PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Perdagangan atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan
SASARAN	1.1 Meningkatnya nilai ekspor	1. Peningkatan Nilai ekspor	Nilai ekspor bersih tahun berjalan

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN
	bersih perdagangan	bersih perdagangan	dikurangi nilai ekspor bersih tahun sebelumnya
	1.2 Meningkatnya perluasan pasar dalam dan luar negeri	1. Jumlah daerah tujuan pemasaran dalam negeri 2. Peningkatan jumlah daerah tujuan pemasaran luar negeri	Jumlah daerah tujuan baru pemasaran dalam negeri tahun berjalan Jumlah daerah tujuan baru pemasaran luar negeri tahun berjalan
	2.2 Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	1. Stabilitas harga bahan pokok dan barang penting lainnya	Tingkat inflasi pada tahun berjalan
	3.2 Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen	1. Persentase penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	$\frac{\text{jumlah penyelesaian pengaduan konsumen}}{\text{jumlah pengaduan konsumen}} \times 100\%$
		2. Persentase ketepatan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan lainnya	Jumlah ukuran barang non Barang dalam keadaan terbungkus yang melebihi batas toleransi/jumlah barang non Barang dalam keadaan terbungkus yang diukur ulang x 100%

Gambar 3. Struktur Organisasi DISPERINDAG (dinas perindustrian dan perdagangan)



3.3.5 Pembentukan Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

3.3.6 Kedudukan Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3.3.7 Struktur Organisasi

Dasar pembentukan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Adapun susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Perindustrian Agro dan Kimia terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia
4. Bidang Perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA) dan Industri Alat Transportasi dan Telematika

(IATT) terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Tekstil dan Aneka
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Industri Alat Transportasi dan Telematika
5. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
- a. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
 - b. Seksi Distribusi dan Ekspor Impor
 - c. Seksi Promosi
6. Bidang Perlindungan Konsumen, terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Konsumen
 - b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
 - c. Seksi Kemetrologian
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

3.3.8 Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun uraian tugas pokok dari masing-masing unsur dalam organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat, melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
3. Bidang Perindustrian Agro dan Kimia, melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian Agro dan Kimia.
4. Bidang Perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) mempunyai tugas pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT)
5. Bidang Perdagangan, melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan, dan pengawasan usaha perdagangan.
6. Bidang Perlindungan Konsumen melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan upaya perlindungan konsumen.

3.3.9 Fungsi Bidang – bidang

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

3. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
4. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
5. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
6. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
7. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
8. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian
9. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
10. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
11. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
12. Pengelolaan anggaran;
13. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
14. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
15. Pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
16. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
17. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
18. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

19. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
20. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
21. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan;
22. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
23. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Perindustrian Agro dan Kimia mempunyai fungsi :

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perindustrian Agro dan Kimia;

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis Bidang Perindustrian Agro dan Kimia;
2. Penyusunan program dan rencana kegiatan di Bidang Perindustrian Agro dan Kimia.
3. Pelaksanaan Penyusunan rumusan teknis pembinaan,penyiapan perijinan dan Pedoman kegiatan usaha di bidang perindustrian Agro dan Kimia.
4. Pelaksanaan Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Sarana, Usaha dan Produksi di bidang Perindustrian Agro dan Kimia.
5. Penyusunan potensi/ profil di bidang Perindustrian Agro dan Kimia.
6. Pelaksanaan Pembinaan Standardisasi dan Design Produk Industri.

7. Pemantauan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan dan moral;
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Perindustrian Agro dan Kimia;
9. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama usaha dengan asosiasi dunia usaha di bidang Perindustrian Agro dan Kimia
10. Pelaksanaan dokumentasi data perindustrian dalam bentuk multimedia;
11. Pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi wirausaha Industri Agro dan Kimia;
12. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
13. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
14. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
15. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
16. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
17. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Industri Logam Mesin, Elektro, Tekstil Dan Aneka Dan IATT

mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT);
2. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT);
3. Penyusunan program dan rencana kegiatan di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT).
4. Pelaksanaan Penyusunan rumusan teknis pembinaan,penyiapan perijinan dan Pedoman kegiatan usaha di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT).
5. Pelaksanaan Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Sarana, Usaha dan Produksi di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT).
6. Penyusunan potensi/ profil di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT).
7. Pelaksanaan Pembinaan Standardisasi dan Design Produk Industri.
8. Pemantauan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan dan moral;

9. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT);
10. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama usaha dengan asosiasi dunia usaha di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT);
11. Pelaksanaan dokumentasi data perindustrian dalam bentuk multimedia;
12. Pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi wirausaha Industri Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT);
13. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
14. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
15. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
16. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
17. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
18. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perdagangan;
2. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha bidang perdagangan;
3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perdagangan;
4. Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan dalam dan luar negeri;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha perdagangan dalam dan luar negeri;
6. Pelaksanaan pemungutan retribusi perdagangan;
7. Pemrosesan rekomendasi perijinan di bidang usaha perdagangan;
8. Pelaksanaan pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perdagangan;
9. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan;
10. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan kegiatan ekspor dan impor;
11. Pemrosesan penerbitan dokumen penyerta barang ekspor;
12. Penyediaan informasi pasar dari aspek harga dan non harga;
13. Pelaksanaan kegiatan promosi produk unggulan melalui berbagai sarana;

14. Pelaksanaan identifikasi potensi perindustrian dan perdagangan sebagai bahan promosi, kerjasama dan pameran dagang
15. Pelaksanaan analisa iklim usaha/kajian, koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan asosiasi dunia usaha di bidang perdagangan;
16. Penyusunan profil/potensi sektor perdagangan;
17. Pelaksanaan kajian/analisis sektor perdagangan;
18. Pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi wirausaha;
19. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
20. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
21. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
22. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
23. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
24. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
25. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang perlindungan konsumen;

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perlindungan konsumen;

2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perlindungan konsumen;
3. Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakkan hukumnya;
4. Pemberian fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang ;
5. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap kebenaran Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP);
6. Pemberian fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang
7. Pelaksanaan pelayanan kegiatan kemetrolagian (penyuluhan, sosialisasi, tera, tera ulang UTTP dan BDKT);
8. Pelaksanaan pos ukur ulang dalam (POSKUR) dan pasar tertib ukur
9. Peningkatan sumber daya manusia di bidang perlindungan konsumen
10. Peningkatan sumber daya manusia kemetrolagian (penera ahli, penera trampil, pengamat tera, pranata laboratorium dan PPNS Metrologi Legal)
11. Pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi sistim perlindungan konsumen;
12. Pelayanan dan penanganan pengaduan konsumen
13. Pelaksanaan fasilitasi dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
14. Pelaksanaan pendaftaran produk barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen;
15. Pelaksanaan dokumentasi data perlindungan konsumen dalam bentuk multimedia;

16. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
17. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
18. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
19. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
20. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
21. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Program-Program DISPERINDAG

Program-program Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Malang yaitu :

1. Meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi dan standarisasi industri.
2. Meningkatkan kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan terhadap konsumen.
3. Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen.

3.3.10 Ketenagakerjaan

Tabel 3. Data PNS Dinas Perindustrian Perdagangan Menurut ESELON

NO	PANGKAT GOL.	JABATAN YANG DIDUDUKI								JUMLAH
		ESELON II		ESELON III		ESELON IV		NONESELON		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/c	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	IV/b		-	2	1	-	-	-	-	3
NO	PANGKAT / GOL	JABATAN YANG DIDUDUKI								JUMLAH
		ESELON II		ESELON III		ESELON IV		NONESELON		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
	IV/a	-	-	1	1	2	3	-	-	7
2	III/d	-	-	-	-	5	4	-	1	10
	III/c	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	III/b	-	-	-	-	-	-	7	6	13
	III/a	-	-	-	-	-	-	-	2	2
3	II/d	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	II/c	-	-	-	-	-	-	3	-	3
	II/b	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	II/a	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	1	3	2	8	7	13	11	45

Sumber : Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Desember 2015

Tabel 4. Data PNS Dinas Perindustrian Perdagangan Menurut Golongan

NO	PANGKAT	GOL.	JUMLAH		JUMLAH	SUB TOTAL
			L	P		
I. 1	Pembina Utama Muda	IV/c	-	1	1	
2	Pembina TK. I	IV/b	2	1	3	
3	Pembina	IV/a	3	4	7	
						11
II. 1	Penata TK. I	III/d	5	5	10	
2	Penata	III/c	1	-	1	
3	Penata Muda TK. I	III/b	7	6	13	
4	Penata Muda	III/a	-	2	2	
						26
III.1	Pengatur TK. I	II/d	1	1	2	
2	Pengatur	II/c	3	-	3	
3	Pengatur Muda TK. I	II/b	-	1	1	
4	Pengatur Muda	II/a	1	-	1	
						7
IV.1	Juru TK. I	I/d	-	-	-	
2	Juru	I/c	-	-	-	
3	Juru Muda TK. I	I/b	1	-	1	
4	Juru Muda	I/a	-	-	-	
						1
V.	PTT	-	-	-	-	
	TOTAL		24	21		45

Sumber : Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Desember 2015

Tabel 5. Data PNS Dinas Perindustrian Perdagangan Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	SD	-	-		
2	SLTP	2	-	2	
3	SLTA	4	1	5	
4	SARJANA MUDA / DIII	1	1	2	
5	S-1	10	13	13	
6	S-2	6	7	13	
7	S-3				
	TOTAL	24	21	45	

3.3.11 Unit Kerja

Dasar pembentukan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- b. Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Adapun susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
- 3 Bidang Perindustrian Agro dan Kimia terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia
4. Bidang Perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA) dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Tekstil dan Aneka
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Industri Alat Transportasi dan Telematika
5. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan

- b. Seksi Distribusi dan Ekspor Impor
 - c. Seksi Promosi
6. Bidang Perlindungan Konsumen, terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Konsumen
 - b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
 - c. Seksi Kemetrologian
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

